

**ANALISIS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

RINGKASAN TESIS

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Tanjungpura

Oleh

ZULKARNAIN
NIM.B61110028



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2014**

ABSTRACT

This Research gets title “*Financially Region Analyzed in Kubu Raya Regency in Order to Autonomous Performing and the Factor of Regarding It,*” by `Zulkarnain`, is one of case study research that is done at Kubu Raya Regency. To the effect of this research is to analyzed of increased region finance independence, PAD (the original regional revenue)'S effectiveness, growth and Elasticity to PDRB and population, and to analyzed of constraint and interference in PAD'S management at Kubu Raya Regency.

This is descriptive observational analysis, data that utilized by stem from BPS (Kubu Raya Regency in Figure) derivative 2010 until 2012. Supporting datas (primary data) of on duty financial Management Income and Region wealth (DPPKAD) Kubu Raya Regency as write-up as regions accepting realization in APBD, and observing result data and interview.

Result observationaling to point out that Regency financial independence zoom Kubu Raya Regency really low each year under 10 %, with average 4,37%, dependable level matter on federal as big as 95,63%. Elasticities arithmetic result PAD to PDRB average 4,14 (elastic). Meanwhile PAD'S elasticity to population/resident average 12,31 (elastic). It's mean is added islandic so far-reaching to PAD'S step-up, 1 equal 12,31, its mean is islandic one percent (1%) ascension cause PAD'S ascension 12,31%. PAD'S accepting effectiveness tends to experience decrease each year, year 2011 constitute supreme contribution tops, this constitute consequence of UU No. 28/2009 applied. But on 2012 happenings too low contribution of PAD, since its dwindling BPHTB'S taxes contribution arising out marks sense moratorium uncovering limit and also horticultural permit prolongation year oil palm 2012. Faced constraint in picking PAD is is still a lot of taxes which was or not be charged especially on year 2012, also consequent of another technical constraint amongst those its reducing person, and its reducing assessable consciousness in pay taxes/retribution and identification that was'n optimal.

Keyword: Regionals Original Revenue, Effectiveness, Elasticity, Degree Fiscal Decentralisation.

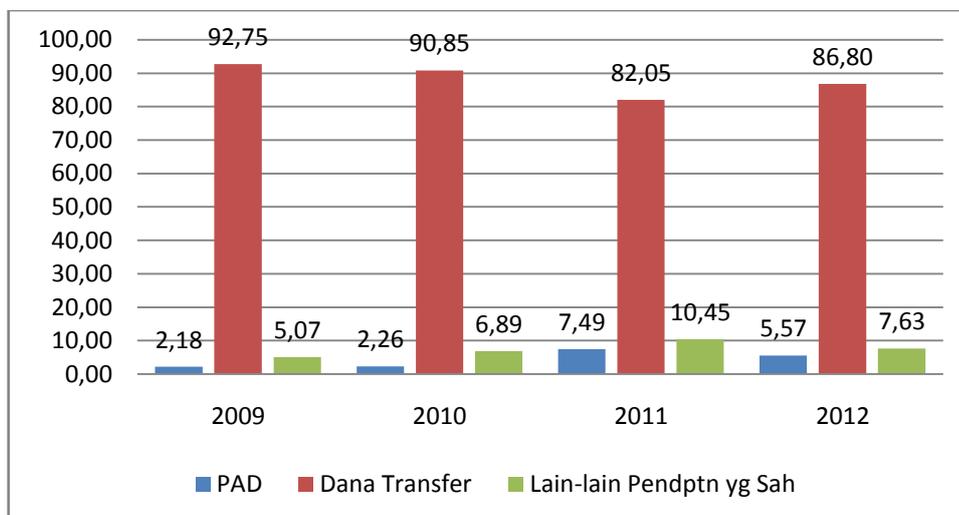
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lebih dari satu dasawarsa, Indonesia memasuki masa otonomi daerah, bermula dari adanya reformasi pemerintahan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Hingga kini, implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat merevisi kedua UU tersebut dan mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Namun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, dan atau Kalimantan Barat pada umumnya dimana keuangan daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Dalam laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Kubu Raya terlihat bahwa jumlah PAD sangat kecil komposisinya dibandingkan dana transfer pemerintah pusat dan penerimaan lainnya, seperti ditunjukkan berikut ini.



Jika kita perhatikan, kondisi yang terjadi pada tahun 2012 terjadi penurunan kontribusi PAD yang sangat drastis dari yakni dari 7,49% pada 2011 menjadi 5,57% pada tahun 2012. Berdasarkan informasi dan pengamatan penulis hal ini disebabkan karena berkurangnya kontribusi dari penerimaan salah satu pajak daerah yakni pajak BPHTB sebagai akibat dari adanya moratorium pembatasan pembukaan maupun perpanjangan perizinan perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2012.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD, sementara di sisi lain potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Kabupaten Kubu Raya yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Hal ini menjadi salah satu yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya ?
2. Bagaimana efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan elastisitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Kubu Raya?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan elastisitas PAD terhadap PDRB dan elastisitas PAD terhadap penduduk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya .

2.1.6. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran hasil kerjadalam pengelolaan keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh suatu derajat prestasi kerja yang dapat diukur. Dari sisi lain yang lebih luas seperti dikatakan Syamsi (dalam Hamzah 2007;7) bahwa

”kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah sendiri dalam memenuhi kebutuhannya jalannya sistem pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan, sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat atau pihak lain dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2001;27) dalam Halim (2007:162), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Adanya **kemampuan** keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. **Ketergantungan** kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

a. Efektifitas

Dari beberapa pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Ukuran efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah adalah ukuran suatu hasil kegiatan dengan target atau rencana yang telah ditentukan. Efektivitas PAD menyangkut semua komponen dan administrasi penerimaan PAD seperti menentukan wajib pajak, retribusi, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak dan membukukan penerimaan. Pengertian efektivitas menurut Devas (1989;144) :

“Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedurdari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.”

Ada beberapa faktor yang mengancam terhadap efektivitas PAD yaitu menghindari pajak oleh wajib pajak dan kelalaian dalam penagihan oleh petugas pajak, dalam hal ini kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang perlu diupayakan.

b. Efisiensi

Efisiensi kaitannya dengan biaya pemungutan, yaitu mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak tersebut. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, efisiensi juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak, dan sebagainya). (Devas, 1989:146).

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Model Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode analisis deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif analisis, menurut Nawawi (1998:63) :

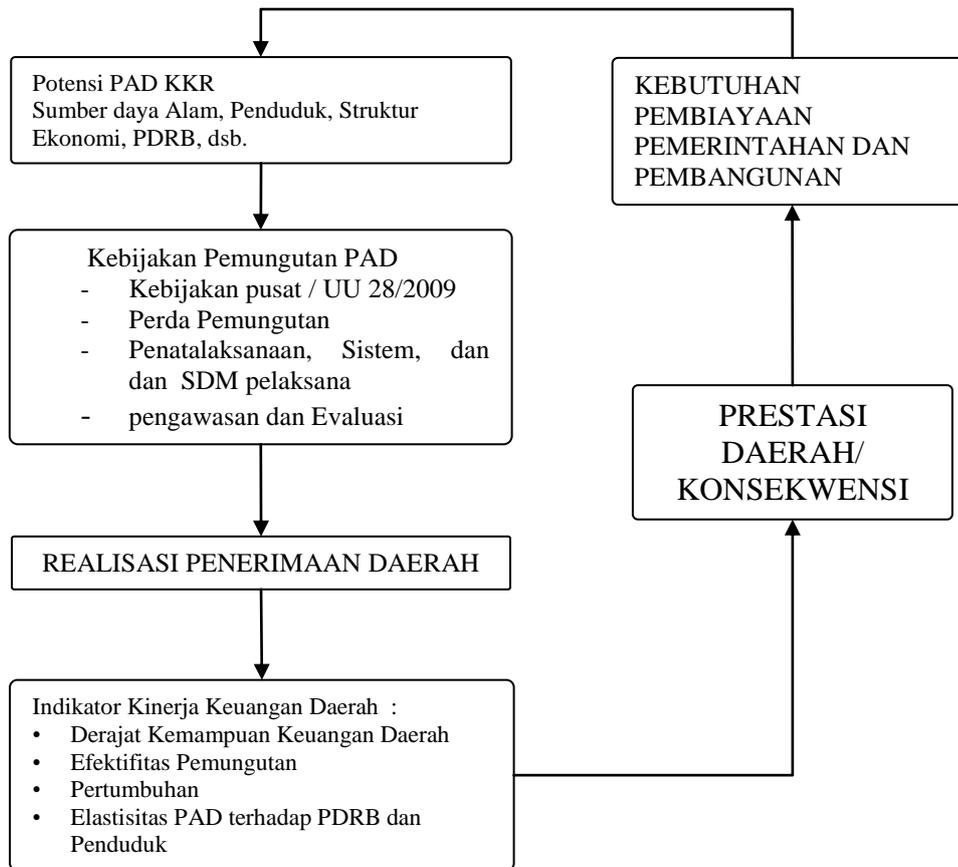
“...metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian (pemecahan masalah) yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang diikuti dengan suatu penjelasan argumentative yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis.”

3.2. Kerangka Berfikir/Prosedur Penelitian

- 1) Mengamati dan menelaah landasan teoritis dan landasan empiris (penelitian terdahulu) yang berhubungan dengan tema penelitian.
- 2) Melakukan identifikasi, pengamatan dan pengumpulan data tentang perkembangan PAD/APBD, kondisi perekonomian di Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2009-2012.
- 3) Menganalisis dengan alat analisis yang digunakan, dan dianalisa berdasarkan teori dan empiris, terakhir membuat kesimpulan dan saran.

3.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Seperti diketahui bahwa pendapatan keuangan daerah kabupaten/kota terdiri dari penerimaan daerah sendiri (PAD), Dana Transfer/bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, dan Pendapatan lain-lain yang sah. Konsep dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kemampuan keuangan Kabupaten Kubu Raya, berapa proporsi pembiayaan yang dibiayai oleh kemampuan sendiri, dan berapa proporsi pembiayaan pembangunan dan pemerintahan yang dibiayai dari pemerintah pusat dan lainnya. Adapun konsep analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



3.5. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian maka alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.5.1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah, artinya kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Formula yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah atau derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007:128).

$$DDF \text{ I} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$DDF \text{ II} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots (2)$$

3.5.2. Analisis Elastisitas

“elastisitas adalah derajat kepekaan atau reaksi dari suatu variabel karena adanya perubahan variabel yang lain.” Pada umumnya yang mengalami perubahan terlebih dahulu merupakan variabel bebas sedangkan yang bereaksi adalah merupakan variabel terikat. Konsep elastisitas dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$E = \frac{Y_1 - Y_0}{\frac{X_1 - X_0}{X_0}} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana :

- E = Nilai elastisitas
- X₀ = Variabel bebas (PDRB, penduduk) tahun sebelumnya.
- X₁ = Nilai PDRB atau penduduk tahun bersangkutan.
- Y₀ = Nilai PAD tahun sebelumnya
- Y₁ = Variabel terikat (PAD) tahun yang bersangkutan.

3.5.3. Analisis Efektivitas

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Komponen PAD}}{\text{Target Penerimaan Komponen PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Atas dasar formula di atas, tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Kubu Raya dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan komponen PAD dengan target yang ditetapkan. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100 persen, maka penerimaan PAD semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan PAD di Kabupaten Kubu Raya semakin baik.

Kriteria efektivitas lebih detil berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690900327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan sebagai berikut :

Skala Efektifitas dalam Pengukuran Kinerja Penerimaan Pajak

o.	N	Skala (Persen)	Kriteria
1.		0 - < 40	Sangat tidak Efektivitas
2.		40 - < 60	Tidak efektif
3.		60 - < 80	Cukup efektif
4.		80 - < 100	Efektif
5.		> 100	Sangat efektif

Sumber : Badan Litbang Depdagri (1991)

3.6. Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Total Penerimaan Daerah (TPD)
3. Jumlah Penduduk
4. PDRB atas dasar harga konstan.

III. HASIL PENELITIAN

4.2.1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

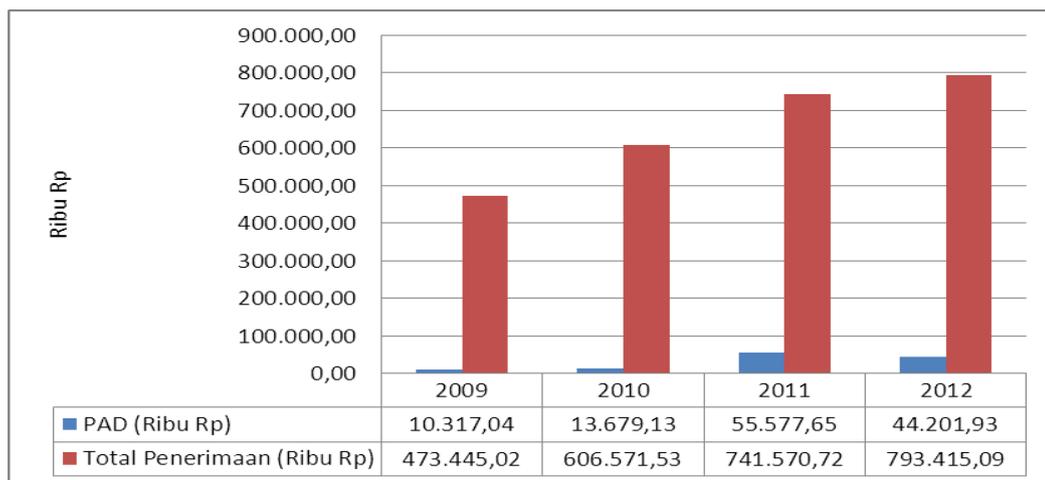
Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan rasio PAD terhadap total penerimaan (rumus 3.1 dan rumus 3.2) pada sub bab berikutnya.

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya dalam penerimaan dari pendapatan asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli tersebut terus meningkat, sehingga dapat memperkecil ketergantungan pada pemerintah pusat.

a. Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kubu Raya, di mana dari sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam APBD, ternyata pos penerimaan dari PAD masih sangat minim.

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terlihat pada realisasi penerimaan APBD Kabupaten Kubu Raya dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 (Gambar 4.4).



Untuk menghitung rasio antara PAD dengan Total pendapatan digunakan rumus (nomor 3) sebagai berikut :

$$\text{DDF I} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Total Pendapatan atau total penerimaan Daerah (TPD) adalah jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan lain-lain penerimaan daerah sah. Berdasarkan data realisasi dalam APBD Kabupaten Kubu Raya dari Tabel 4.6, diketahui nilai PAD dan total pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya, sehingga dapat dihitung rasio untuk setiap tahun sebagai berikut :

Tahun 2009 =	$\frac{10.317,04}{473.445,02}$	= 2,18 (%)	Sangat Kurang
Tahun 2010 =	$\frac{13.679,13}{606.571,53}$	= 2,26 (%)	Sangat Kurang
Tahun 2011 =	$\frac{55.577,65}{741.570,72}$	= 7,49 (%)	Sangat Kurang
Tahun 2012 =	$\frac{44.201,93}{793.415,09}$	= 5,57 (%)	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan di atas ternyata nilai Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kubu Raya sangatlah kurang setiap tahun di bawah 10 %, dan rata-rata hanya 4,37%. Dengan demikian menurut kriteria Depdagri tergolong sangat rendah, yang berarti tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dan lainnya sebesar 95,63%.

b. Rasio PAD Terhadap Total Pengeluaran

Rendahnya Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan juga dengan seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai pemerintahan, indikatornya adalah rasio antara PAD dengan jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah. Adapun rasio PAD terhadap Total Pengeluaran adalah sebagai berikut.

Tahun 2009 =	$\frac{10.317,04}{440.461,37}$	= 2,34 (%)	Sangat Kurang
Tahun 2010 =	$\frac{13.679,13}{610.507,87}$	= 2,24 (%)	Sangat Kurang

$$\text{Tahun 2011} = \frac{55.577,65}{759.092,58} = 7,32 (\%) \quad \text{Sangat Kurang}$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{44.201,93}{805,466,70} = 5,49 (\%) \quad \text{Sangat Kurang}$$

Jika kita perhatikan dari sisi pengeluaran, rasio PAD rata-rata dibawah 10 persen (rata-rata hanya menyumbang 4,35%) terhadap total pengeluaran pada APBD Kabupaten Kubu Raya. Angka ini menurut kriteria Depdagri adalah sangat rendah.

4.2.2. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data DPPKAD Kabupaten Kubu Raya , target dan realisasi PAD Kabupaten Kubu Raya ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2008-2011**

No	Tahun	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2009	11.600.422.000,00	10.317.044.920,55
2	2010	18.150.911.325,54	13.679.129.524,53
3	2011	51.468.327.031,42	55.577.649.588,28
4	2012	58.903.525.000,00	44.201.933.899,50

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah, DPPKAD Kubu Raya

Dari data target dan realisasi selanjutnya kita dapat membuat analisis efektifitas. Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi riil. Dengan kata lain, efektifitas maksudnya adalah seberapa besar realisasi pajak berhasil mencapai potensi yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Berdasarkan formula yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini dilakukan penghitungan efektifitas penerimaan PAD di Kabupaten Kubu Raya untuk masing-masing tahun dari 2009 hingga 2012.

a. Tahun 2009

Berdasarkan data dari DPPKAD Kabupaten Kubu Raya diketahui target/potensi penerimaan PAD tahun 2009 sebesar Rp11.600.422.000,00,

sementara dalam laporan realisasi penerimaan PAD tahun 2009 adalah sebesar Rp10,317,044.920,55 sehingga dapat dihitung efektifitas penerimaan PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{10.317.044.920,55}{11.600.422.000,00} \times 100\% \\ &= 88,94\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas penerimaan total PAD di Kabupaten Kubu Raya tahun 2009 adalah 88,94 persen, menurut kriteria Depdagri ini kurang efektif.

b. Tahun 2010

Berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp13.679.129.524,53 dan target sebesar Rp 18.150.911.325,54, maka dapat dihitung efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{13.679.129.524,53}{18.150.911.325,54} \times 100\% \\ &= 75,36 \%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan target dan relisasi di atas diperoleh tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2010 adalah sebesar 73,36 persen. Tahun 2010 juga kurang efektif artinya tingkat capaian penerimaan tidak mencapai yang ditargetkan.

c. Tahun 2011

Berdasarkan potensi/target penerimaan PAD sebesar Rp51.468.327.031,42, dan realisasi sebesar Rp55.577.649.588,28, sehingga tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 adalah:

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{55.577.649.588,28}{51.468.327.031,42} \times 100\% \\ &= 107,98 \%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 adalah 107,98 persen. Angka ini cukup tinggi di atas 100, dan dikategorikan sangat efektif.

d. Tahun 2012

Pada tahun 2012 diketahui realisasi PAD sebesar Rp44.201.933.899,50. Sedangkan target pada tahun 2012 adalah sebesar Rp58.903.525.000,00, sehingga diketahui efektivitas penerimaan PAD tahun 2012 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{44.201.933.899,50}{58.903.525.000,00} \times 100\% \\ &= 75,04\% \end{aligned}$$

Perkembangan efektivitas penerimaan pajak daerah selama empat tahun terakhir (dari 2009 hingga 2012) tingkat efektivitas pada tahun 2012 merupakan capaian yang terendah. Hasil perhitungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuasi, dari 88,94% pada 2009 hingga 75,04% pada tahun 2012.

4.2.3. Analisis Elastisitas PAD terhadap Penduduk dan PDRB

a. Elastisitas PAD terhadap PDRB

Berdasarkan data realisasi PAD dan data PDRB Kabupaten Kubu Raya periode 2008-2012, maka perubahan/penambahan jumlah masing-masing PAD dan PDRB di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PAD dan PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2009-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	PDRB	PAD
2009	4.647.308,00	10.317.044.920,55
2010	4.936.652,99	13.679.129.524,53
2011	5.258.029,11	55.577.649.588,28
2012	5.609.791,26	44.201.933.899,50
Rata-rata	5.112.945,34	30.943.939.483,22

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kubu Raya dan BPS

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dihitung elastisitas PAD terhadap PDRB di Kabupaten Kubu Raya untuk masing-masing tahun dengan rumus nomor 3.5 sebagai berikut.

$$E = \frac{\frac{PAD_{\text{tahun berjalan}} - PAD_{\text{tahun sebelumnya}}}{PAD_{\text{tahun sebelumnya}}}}{\frac{PDRB_{\text{tahun berjalan}} - PDRB_{\text{tahun sebelumnya}}}{PDRB_{\text{tahun sebelumnya}}}}$$

Adapun hasil perhitungan elastisitas setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Elastisitas PAD Terhadap PDRB KR, Tahun 2008 – 2012

Ta hun	ΔPAD	ΔPDRB	ΔPAD	ΔPDRB	ELASTI SITAS
			PAD	PDRB	
2009					
2010	3.362.084.603,98	289.344,99	0,25	0,06	4,19
2011	41.898.520.063,75	321.376,12	0,75	0,06	12,33
2012	-11.375.715.688,78	351.762,15	-0,26	0,06	-4,10
Rerata	11.294.962.992,98	320.827,75	0,25	0,06	4,14

Sumber : Data DPPKAD di olah

Dilihat dari angka elastisitas pada tabel di atas menunjukkan angka yang elastisitas yang nilainya bervariasi. Nilai elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2009-2012 adalah dengan masing-masing 4,19 ; 12,33 ; -4,10 dengan rata-rata sebesar 4,14. Dalam konsep elastisitas nilai lebih dari satu berarti *elastis* yang artinya setiap perubahan atau penambahan satu persen PDRB pengaruhnya terhadap penambahan PAD sebesar 4,14%.

b.Elastisitas PAD terhadap Jumlah Penduduk

Terkait dengan tingkat elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk, secara rasional perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi perubahan jumlah penerimaan pajak, retribusi dan komponen PAD lainnya. Dengan bertambahnya penduduk maka semakin bertambah juga kapasitas dari komponen PAD.

Berdasarkan data yang tersedia di BPS jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2008-2012 (Tabel 4.2), selanjutnya dapat dihitung elastisitas PAD terhadap penduduk dengan rumus nomor 3.5 yaitu dengan membandingkan

persentase pertumbuhan Pendapatan Asli daerah terhadap pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya yang hasilnya ditampilkan pada Tabel berikut ini.

**Elastisitas PAD Terhadap Penduduk Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2010-2012**

Tahun	PNDDUK	PAD	Δ PAD	Δ PNDDUK	Δ PN	PAD	ELAS TISI TAS
					D	Δ PAD	
2009	490.408	10.317.044.90					
2010	500.970	13.679.129.50	3.362.084.603,98	10.562,00	0,02	4,07	11,66
2011	511.235	55.577.649.60	41.898.520.063,75	10.265,00	0,02	1,33	37,55
2012	522.174	44.201.933.90	- 11.375.715.688,78	10.939,00	0,02	-3,89	-12,28
Rerata	506.196,75	30.943.939.50	11.294.962.992,98	10.588,67	0,02	0,50	12,31

Sumber : Data hasil olahan

Hasil perhitungan elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya tahun 2008-2012 masing-masing sebesar 11,66 ; 37,55 ; -12,28, dengan rata-rata sebesar 12,31. Angka elastisitas PAD terhadap penduduk sebesar 12,31 lebih besar dari satu (bersifat elastis). Artinya bahwa perubahan atau penambahan penduduk sebesar 1 % menyebabkan penambahan jumlah PAD sebesar 12,31%. Artinya bahwa penambahan penduduk di Kabupaten Kubu Raya hanya sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PAD.

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektifitas dan tingkat kemandirian keuangan di KKR diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi rendah
2. Pengetahuan masyarakat tentang pajak/retribusi rendah
3. Penghindaran pajak/retribusi (taxavoidance) tinggi
4. Masalah kelembagaan
5. Peraturan hukum (perda) yang kurang tegas
6. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah kurang
7. Sanksi pajak yang kurang tegas
8. Sistem reward yang kurang memotivasi

9. Kendala administrasi
10. Tidak adanya insentif pajak/retribusi kepada investor (misalnya dalam bentuk *local tax holiday*)
11. Kurangnya jumlah personel petugas pemungut
12. Biaya pemungutan pajak/retribusi yang tinggi

Dengan berpedoman pada UU No 28 tahun 2009, peningkatan sumber pendapatan PAD dapat dilakukan dengan kebijakan dan administrasipajak dan retribusi daerah. Memperbaiki administrasi pajak bisa melalui perbaikan sistem dan prosedur koleksi melalui perbaikan basis data, penghitungan potensi penerimaan, mekanisme penagihan, dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah juga dapat menentukan berbagai aturan main diantaranya merubah tarif dan basis penerimaan. Adanya UU tersebut pemerintah daerah dimungkinkan untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah.

Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah, terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel ekonomi) yang mempunyai kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Beberapa faktor yang tidak bisa dikendalikan tersebut menurut, yaitu :

- 1) Kondisi sosial ekonomi daerah dan struktur ekonomi.
- 2) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan.
- 3) Perkembangan PDRB per kapita riil.
- 4) Pertumbuhan penduduk.
- 5) Tingkat inflasi.
- 6) Penyesuaian tarif.
- 7) Pembangunan prasarana baru.
- 8) Sumber pendapatan baru, dan
- 9) Perubahan peraturan..

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kubu Raya sangatlah rendah setiap tahun di bawah 10 %, dan rata-rata hanya 4,37%, menurut kriteria Depdagri tergolong sangat rendah, yang berarti tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dan lainnya sebesar 95,63%. Dari sisi pengeluaran, rasio PAD rata-rata hanya menyumbang 4,35% terhadap total pengeluaran Kabupaten Kubu Raya.
2. Hasil perhitungan elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Kubu raya periode tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 4,14 (*elastis*) artinya setiap penambahan satu persen PDRB pengaruhnya terhadap penambahan PAD sebesar 4,14%. Sedangkan elastisitas PAD terhadap penduduk dengan rata-rata sebesar 12,31 (*elastis*). Artinya bahwa penambahan penduduk di Kabupaten Kubu Raya sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD 1 berbanding 12,31, artinya kenaikan satu persen penduduk menyebabkan kenaikan PAD 12,31%.
3. Hasil perhitungan efektifitas pemungutan PAD selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan setiap tahun, dimana tahun 2011 merupakan puncak kontribusi tertinggi, hal ini merupakan konsekwensi dari pemberlakuan UU No 28 tahun 2009. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan kontribusi PAD yang sangat drastis, hal ini disebabkan karena berkurangnya kontribusi dari penerimaan pajak BPHTB sebagai akibat dari adanya moratorium pembatasan pembukaan maupun perpanjangan perizinan perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2012.
4. Kendala utama yang dihadapi Kabupaten Kubu Raya dalam pemungutan PAD adalah masih banyaknya pajak yang belum atau tidak tertagih terutama pada tahun 2012, juga sebagai akibat dari kendala teknis lainnya diantaranya

kurangnya personil, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maupun retribusi.

5.1. Saran

1. Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada awal berdirinya sebagai kabupaten baru, kondisi keuangan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik hingga pada tahun ke empat (2011 menuju 2012) terjadi penurunan penerimaan PAD hingga mencapai angka negatif, Untuk mengatasi persoalan tersebut tidak ada jalan lain kecuali dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan PAD kembali, diantaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta perbaikan sistem, personil dan identifikasi objek pajak dan retribusi.
2. Elastisitas PAD terhadap penduduk yang cukup tinggi menandakan bahwa pertumbuhan penduduk memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PAD, namun hal ini perlu dilakukan pengujian secara statistik, karena bisa saja bukan pengaruh dari pertumbuhan penduduk. Namun dalam upaya peningkatan PAD, hal ini bisa dijadikan referensi dan sebagai dasar dalam upaya meningkatkan kesadaran penduduk untuk membayar pajak dan retribusi.
3. Program sosialisasi pajak dan retribusi daerah penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
4. Perlu penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sistem perpajakan, dengan adanya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat yang tidak membayar pajak (*tax evasion*) maupun bagi aparat pajak. Sebaliknya pemberian insentif pajak untuk menarik investor, misalnya dengan memberi kan local tax holiday.
6. Penyederhanaan sistem administrasi pajak dan retribusi daerah, langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa dipersulit dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Masyarakat yang sudah sadar untuk membayar pajak dan retribusi seringkali menjadi enggan untuk membayai pajak karena sistem administrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan. Oleh karena itu,

pemerintah daerah perlu mengusahakan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

7. Penambahan personel (aparatus) pemungut pajak di lapangan. Selain secara kuantitatif ditambah jumlahnya, kualitas aparatus pemungut pajak juga harus ditingkatkan, baik profesionalisme maupun kualitas moralnya.
8. Sebaiknya ada perhitungan potensi pajak sebelum menetapkan target anggaran serta perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kebenaran omzet penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua, Yogyakarta, STIE- YKPN
- Batafor, Gregorius Gehi, 2011, *“Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT.* Tesis untuk memperoleh gelar magister pada program magister, Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Davey K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga,*” Penerbit UIPress.
- Devas, Nick., et all, 1989. **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Jakarta: UI Press.
- Fattah, Sanusi, Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Tidak dipublikasikan)
- Hamzah, Ardi, 2007 *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan* (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006), Tesis Universitas Trunojoyo,
- Harold M. Groves, *Financing Government*, Henry Holt and Company, New York, 1951, halaman 11-15.dalam **Ekonomi Publik - 4: Pendapatan Asli Daerah: Pajak Daerah**
- Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan.* Edisi Keempat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, Guritno, Dr, M.Ec, 2001, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Nadeak, Ruslina. 2003. *“Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah”.* Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma.
- Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, halaman 58 - 90.

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Edisi Kedua. Yogyakarta, UPPSTIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Keempat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Thesaurianto, 2007 "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (Tidak dipublikasikan)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nawawi H.Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Sarno, 2012, "Analisis Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Mencapai Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011", Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura (tidak dipublikasikan)
- Sudiman, 2010, "Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Mencapai Kemandirian Otonomi Daerah di Kabupaten Landak." Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura (tidak dipublikasikan).
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Jakarta, GajaGrafindo Persada.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suparmoko, M., 1987, *Intergovernmental Finance in Indonesia*, Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia , Vol.XXXIV , No.4 .45-54.

- Suparmoko, Ph.D, 2001, “Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,” Edisi I, Yogyakarta ; ANDI
- Sutrisno, P.H, 1982,*Dasar-Dasar Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. Stephen C. Smith, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi ke VIII Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Uppal,J.S, *et all*, 1987, *Intergovernmental Finance in Indonesia*,Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol.XXXIV , No.4 .45-54.
- Todaro, Michael P. Stephen C. Smith, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.Uppal.
- Thesaurianto Kuncoro, 2007 ”*Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*, TesisProgram Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (Tidak dipublikasikan)
- Wahyuni, Nanik, 2007, *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Engelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*, Tesis, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang (tidak dipublikasi).
- Winata, I Nyoman Mursa. 2012. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ”Widya Sentana” Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- Yacoub, Yarlina, 2012 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya. (Tidak dipublikasikan)